

TESIS

**TANGUNG GUGAT PEMERINTAH TERHADAP PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN DEFORESTASI HUTAN**



OLEH :

MUHAMMAD AFIF HIDAYATULLOH

NIM : 031824153026

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

**TANGUNG GUGAT PEMERINTAH TERHADAP PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN DEFORESTASI HUTAN**

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Minat Studi Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Oleh :

MUHAMMAD AFIF HIDAYATULLOH, S.H.

031824153026

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

MOTTO

“TERUSLAH BERUSAHA DAN BERDOA”

**TESIS INI TELAH DIUJI dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
pada Hari Jumat 21 Januari 2022**

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Dr. Sri Winarsih, S.H., M.H.

Anggota :

- 1. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.**
- 3. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.**
- 4. Franky Butar Butar, S.H., M.Dev .**

PERNYATAAN ORIGINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya :

Nama : Muhammad Afif Hidayatulloh, SH

NIM : 031824153026

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Minat Studi : Hukum Pemerintahan

Judul : **TANGUNG GUGAT PEMERINTAH TERHADAP PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN DEFORESTASI HUTAN**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak memiliki kesamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar adanya maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Surabaya, 21 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Muhammad Afif Hidayatulloh, SH
NIM.031824153026

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang Tanggung Gugat Pemerintah terhadap pengendalian dan penanggulangan deforestasi hutan. Permasalahan deforestasi mulai muncul kembali pasca diundangkan-nya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu dihapusnya batas minimal luas kawasan hutan yang semula sebesar 30 % dalam UU Kehutanan dan Penyederhanaan izin pemanfaatan hutan yang diatur dalam Pasal 26 UU Kehutanan menjadi izin berusaha yang diberikan oleh pemerintah pusat. Perubahan tersebut yang memindahkan kewenangan penerbitan izin berusaha terkait masalah kehutanan ke pemerintah pusat, yang semula berada pada pemerintah daerah, dapat mengikis peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam penerbitan izin. Peran serta masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam *Environmental Decision-making*—bagian terpenting dari peran serta tersebut dengan kata lain ada dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu Tanggung Gugat dalam deforestasi hutan ditujukan terhadap tindakan pemerintah berupa izin yang merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menyebabkan terjadinya deforestasi hutan yang merugikan masyarakat.

Kata Kunci : Tanggung Gugat Pemerintah, Deforestasi Hutan, Perizinan, Partisipasi Masyarakat, Keputusan Tata Usaha Negara.

ABSTRAC

This thesis examines the Government's Liability for controlling and tackling deforestation. The problem of deforestation began to reappear after the enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation, namely the abolition of the minimum limit of forest area which was originally 30% in the Forestry Law and Simplification of forest utilization permits regulated in Article 26 of the Forestry Law into permits. provided by the central government. The change that transfers the authority to issue business permits related to forestry issues to the central government, which was originally in the hands of local governments, can erode the participation of the community and local governments in issuing permits. Community participation plays a very important role in Environmental Decision-making—the most important part of this participation in other words is in the decision-making process. In addition, liability in deforestation is aimed at government actions in the form of permits which are a form of State Administrative Decisions that can cause deforestation to harm the community.

Keywords: Government Liability, Forest Deforestation, Licensing, Community Participation, State Administrative Decisions.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432)

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601)

Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang PerubahanUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan

Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22 ,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggara Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 , Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6634)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Hutan Masyarakat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT pencipta seluruh alam semesta yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi berjudul "TANGUNG GUGAT PEMERINTAH TERHADAP PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN DEFORESTASI HUTAN" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian tesis ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga :

1. Allah SWT Tuhan seluruh alam yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada seluruh umatnya termasuk diri penulis sehingga dalam penulisan ini diberikan kemudahan serta pertolongan sampai dapat menyelesaikan ujian penulisan ini.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

3. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. selaku Ketua Dosen Pembimbing yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan sehingga penulisan dapat terselesaikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan Ibu dengan balasan yang terbaik, Aamiin.
4. Bapak Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dr. Sri Winarsih, S.H., M.H. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., Bapak Franky Butar Butar, S.H., M.Dev selaku Dosen Penguji yang selalu memberikan arahan dan petunjuk sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H selaku Dosen Wali penulis yang terus memotivasi dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Magister Hukumnya dengan baik.
7. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang luar biasa karena tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga mendidik mahasiswa-mahasiswanya dengan sabar. Terima kasih atas semua ilmu dan motivasinya.
8. Kedua Orang Tua Mama Afifah Ernawati, SE dan Ayah Rahmat Hidayat, MM yang selalu memberikan motivasi dan dukungan baik moril maupun immateriil sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, semoga apa yang menjadi cita-cita kedua Orang Tua ku untuk seluruh anak-anaknya dapat tercapai, Aamiin.

9. Seluruh mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena telah bersama-sama Penulis dalam kuliah, bergaul, dan bercanda selama ini. Semoga tetap dijaga pertemanannya hingga nanti. See you on top, guys!

Saya menyadari bahwa manusia tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan baik dalam berpikir atau bertindak, untuk itu Saya mengharapkan kritik dan saran dari pembaca tesis ini. Segala kesempurnaan dari penulisan ini datangnya dari Allah SWT Tuhan seluruh alam dan segala kesalahan yang ada dari penulisan ini datangnya dari penulis. Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat serta refrensi dalam ilmu hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	II
MOTTO	III
LEMBAR PENGESAHAN	IV
ABSTRAK	VII
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	IX
KATA PENGANTAR	XI
DAFTAR ISI.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Tinjauan Pustaka	8
1.5.1. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	8
1.5.2. Wewenang Pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian Deforestasi Hutan.....	9
1.5.3. Konsep Tanggung Jawab Pemerintah	12
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.6.1. Tipe Penelitian	13
1.6.2. Pendekatan Penelitian	14
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	14
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.6.5. Analisa Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	15
BAB II HUBUNGAN ANTARA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN DEFORESTASI HUTAN	17
2.1. Sejarah dan Perkembangan Deforestasi di Indonesia.....	17
2.2. Hubungan Good Environmental Governance dan Deforestasi	38
2.3. Deforestasi dan Undang-Undang Cipta Kerja.....	45
BAB III TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH TERHADAP DEFORESTASI HUTAN.....	51
3.1. Tanggungjawab Pemerintah dalam Menjaga Hutan.....	51
3.2. Tanggung Gugat Pemerintah.....	56

3.3. Tanggung-gugat Pemerintah Terhadap Terjadinya Deforestasi Hutan...	59
BAB IV PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan.....	67
4.2 Saran	68
DAFTAR BACAAN.....	69